

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membantu negara mewujudkan kemandirian masyarakat, khususnya kelompok rentan secara ekonomi dan fisik. Hal ini mencakup proses penguatan individu agar dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan lembaga yang memengaruhi kehidupannya serta mengembangkan kemampuan diri untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri (Kamil et. al., 2021). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga bertujuan memperkuat kelembagaan agar mampu mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan secara berkeadilan dan berkelanjutan (Afriansyah et al., 2023). Berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, LSM, dan pihak swasta melalui program CSR, terlibat dalam upaya ini. Namun, kajian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah *gampong* melalui program BUMG.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *gampong* (desa dalam bahasa Indonesia) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, nilai sosial budaya, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kabupaten/Kota (Timotius, 2018). Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 juga memberikan desa kekuasaan mengelola sumber daya alam dan arah pengembangannya, sehingga desa kini memiliki otonomi untuk membangun secara mandiri, tanpa bergantung pada arahan dari Kecamatan, Kabupaten, atau pemerintah. Dalam konteks Aceh, istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dikenal sebagai Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). BUMG yaitu lembaga usaha yang dikelola masyarakat dan pemerintah *gampong* untuk memperkuat ekonomi berdasarkan potensi lokal, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Safitri et. al., 2021).

BUMG berperan dalam pemberdayaan ekonomi mikro kecil menengah, mendukung masyarakat *gampong* untuk mencapai kemandirian. Pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana desa dalam mewujudkan kemandirian desa bersifat pemberdayaan melalui pembangunan fisik, maupun pemberdayaan yang bersifat pembagunan non fisik seperti pembangunan ekonomi. Salah satu indikator pembangunan ekonomi dilakukan melalui BUMG, seperti program simpan pinjam uang, program pengadaan alat produksi pertanian, program sewa menyewa soundsystem, tenda, kursi, peralatan, pengadaan asset fisik yang menunjang kemandirian ekonomi masyarakat *gampong* seperti sawah, kebun dan lainnya.

Selain itu program pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui program di sektor pertanian, peternakan, perikanan, *home industry*, kerajinan tangan dan ekowisata. Penerapan Undang-Undang Desa yang menetapkan standar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di Aceh telah sukses menjalankan peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Contohnya, BUMG di *Gampong* Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang memprioritaskan tiga jenis usaha utama: peternakan sapi dan kambing, simpan pinjam emas, serta layanan doorsmeer (Asni & Chan, 2023). Hal senada terkait

data BUMG yang berhasil memberdayakan masyarakat juga dijumpai di Kota Langsa. Program BUMG Tunas Muda berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat, karena melalui program tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai actor utama dalam program pemberdayaan ekonomi.

Pelaksanaan program dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu melalui FGD, sosialisasi program, penyuluhan dan pelatihan, pedampingan, serta monitoring dan evaluasi bertahap terhadap kegiatan yang dilakukan. Hasil yang dicapai dari program tersebut yaitu meningkatnya pengetahuan mitra hingga 90% dan mampu menaikkan pendapatan ekonomi BUMG hingga 30% (Mastuti, 2023). BUMG Maju Jaya di *Gampong* Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, telah berhasil mengelola pendapatan dan usaha secara efektif.

Peunaga Pasi, yang terletak di tepi pantai, memiliki potensi wisata yang besar, dengan fasilitas seperti *waterboom* yang beroperasi sejak 2018, area bermain anak, serta berbagai aset BUMG seperti traktat, becak, sound system, pompa air isi ulang, dan delapan warung permanen. Keberhasilan ini menunjukkan pengelolaan yang baik dalam mengembangkan potensi wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMG Peunaga Pasi sendiri didirikan tahun 2017 dan saat ini pembangunannya dilakukan oleh DPMG dengan anggaran Rp. 104 Juta untuk alokasi wisatanya.

Pada tahun 2018 BUMG telah mendapatkan pendapatan di Rp. 37 Juta, kemudian 2019 Rp. 78 Juta dan tahun 2020 Rp. 50 Juta. *Waterboom*, sebagai program unggulan dari BUMG telah mencatat laba bersihnya di tahun 2018 sekitar Rp. 128 juta dan masuk dalam pendapatan desa. BUMG Peunaga Pasi terus berkembang dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat setempat

untuk mengelola potensi wisata secara berkelanjutan. Keberhasilan program BUMG Maju Jaya di Aceh Barat, khususnya di *Gampong* Peunaga Pasi, menjadi contoh nyata pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan aset berbasis potensi lokal seperti wisata air dan fasilitas pendukung lainnya. Peningkatan pendapatan desa secara signifikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam program ini menegaskan pentingnya penelitian terkait pemberdayaan masyarakat melalui program BUMG di Aceh Barat. Dengan fokus pada optimalisasi potensi lokal kawasan pesisir, penelitian ini relevan dan menarik untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan strategis dalam pengelolaan BUMG sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa Program BUMG Maju Jaya di Aceh Barat mampu berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat *Gampong* Peunaga Pasi ?
2. Bagaimana peran dan strategi pengelolaan BUMG Maju Jaya dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di Aceh Barat ?

1.3 Fokus Penelitian

1. Program BUMG Maju Jaya dalam memberdayakan masyarakat Peunaga Pasi.
2. Strategi pengelolaan BUMG Maju Jaya dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat Peunaga Pasi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi Program BUMG Maju Jaya di Aceh Barat yang mampu berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat *Gampong* Peunaga Pasi.

2. Untuk menganalisis peran dan strategi pengelolaan BUMG Maju Jaya dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di Aceh Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sosiologi kepariwisataan, sosiologi ekonomi, dan ilmu terkait lainnya, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) Maju Jaya di Desa Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMG, serta memperkuat peran BUMG dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

1. Kepada Direktur BUMG Maju Jaya

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan panduan yang lebih mendalam tentang strategi pengelolaan BUMG yang efektif, serta bagaimana meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pemberdayaan ekonomi masyarakat, Direktur BUMG dapat mengoptimalkan program-program yang dijalankan, meningkatkan kapasitas pengelolaan, dan memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait, sehingga mendorong kemajuan ekonomi desa secara berkelanjutan.

2. Bagi *Keuchik* Peunaga Pasi

Bagi Kepala Desa, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa melalui

BUMG. *Keuchik* dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk merancang program-program yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat peran BUMG dalam pembangunan desa.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan BUMG dan memaksimalkan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Dengan adanya pemberdayaan yang lebih terstruktur, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Selain itu, penelitian ini juga mendorong terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa